



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI
HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Khoirun Nisa

1202025095

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI
HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP PENGALOKASIAN
ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Khoirun Nisa

1202025095

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 16 September 2017
Yang Menyatakan,

METERAI
TUMPEL

030AAAEF541634824

6000
ENAM RIBURUPIAH

(Khoirun Nisa)


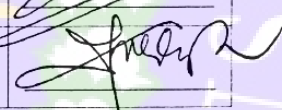
NIM 1202025095

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI
HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI HASIL
BUKAN PAJAK TERHADAP
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TIMUR

NAMA : KHOIRUN NISA
NIM : 1202025095
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
TAHUN AKADEMIK : 2016-2017

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.	
Pembimbing II	M. Nurrasyidin, S.E., M.Si.	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Daram Heriansyah, S.E., M.Si

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,
DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI HASIL BUKAN
PAJAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA
MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang disusun oleh :
Khoirun Nisa
1202025095

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 26 Agustus 2017

Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :



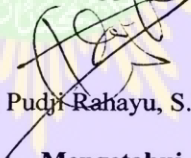
(Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., CA., CPA.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Sumardi, S.E., M. Si.)

Anggota :



(Dewi Pudji Rahayu, S.E., M. Si)

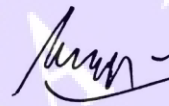
Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Daram Heriansyah, S.E., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoirun Nisa
NPM : 1202025095
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

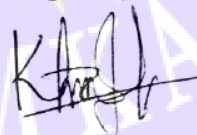
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 16 September 2017
Yang Menyatakan,



Khoirun Nisa
(NIM.1202025095)

ABSTRAKSI

Khoirun Nisa (1202025095)

“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HASIL PAJAK, DAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR”.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) dan Belanja Modal (BM).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu memperoleh data berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang berisi tentang jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) dan Belanja Modal (BM) di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Variabel yang diteliti adalah variabel X yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak, sedangkan variabel Y adalah belanja modal. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linear berganda, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

Hasil dari pengolahan data menggunakan SPSS versi 20.0 dan diperoleh persamaan regresi linier berganda $BM = -23,647 + 0,327 PAD + 0,214 DAU - 0,071 DBHP + 2,010 DBHBP$ yang telah diuji kelayakan asumsi normalitas terdistribusi normal serta tidak terjadi heterokedastisitas, tidak terjadi

multikolinieritas dan tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif, maka model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal dengan nilai t_{hitung} sebesar $1,762 > t_{tabel}$ 2,000 dengan signifikansi $0,083 < 0,05$. Variabel dana alokasi umum berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai t_{hitung} $3,231 > t_{tabel}$ 2,000 dengan signifikansi $0,002 < 0,05$. Variabel dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja modal dengan nilai t_{hitung} $0,320 > t_{tabel}$ 2,000 dengan signifikansi $0,750 < 0,05$. Variabel dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai t_{hitung} $2,606 > t_{tabel}$ 2,000 dengan signifikansi $0,012 < 0,05$. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama) keempat variabel independen tersebut yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan nilai uji F_{hitung} $47,539 > F_{tabel}$ (4;60) = 2,53 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan analisis *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa pengaruh antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap belanja modal, yaitu sebesar 74,4% dan sisanya 25,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya seperti dana alokasi khusus dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memberikan saran-saran kepada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan sumber-sumber potensi daerah agar dapat meningkatkan penerimaan daerah dan digunakan dalam pembangunan maupun keperluan daerah.

ABSTRACT

KHOIRUN NISA (1202025095)

“THE EFFECT OF LOCAL OWN REVENUE, GENERAL ALLOCATION FUNDS, FUNDS FOR TAX RESULTS, AND FUNDS FOR RESULTS IS NOT A TAX TO THE ALLOCATED BUDGET CAPITAL EXPENDITURE IN DISTRICT/CITY OF EAST JAVA ”

Thesis. Bachelor Degree Program of Accounting Study. Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2017. Jakarta.

Keywords: Local Own Revenue (PAD), General Allocation Funds (DAU), funds for Tax Results (DBHP), funds for Results is not a tax (DBHBP) and capital expenditure (BM).

This study uses secondary data, to obtain data such as the Budget Realization Report Revenue and Expenditure of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI), which contains the local own revenue (PAD), general allocation funds (DAU), funds for tax results (DBHP), funds for results is not a tax (DBHBP) and capital expenditure (BM) in District/City the province of East Java. The variables studied were variable X namely local own revenue, general allocation funds, funds for tax results, funds for results is not a tax, while variable Y is the capital expenditure. Data analysis and processing techniques used are accounting analysis, descriptive statistic analysis, classical assumption (normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, autokorelasi test), multiple linear regression analysis, analysis of the coefficient of determination and hypothesis testing.

The results of data processing using SPSS version 20 and obtained by multiple linear regression equation $BM = -23,647 + 0,327 PAD + 0,214 DAU - 0,071 DBHP + 2,010 DBHBP$ who have tested the feasibility of the assumptions of normality normally distributed and does not occur heterokedastisitas, multikolinieritas not happen and does not happen either positive autocorrelation or negative, then the regression model BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

The test results showed that local own revenue negative and insignificant impact on capital expenditure with t_{count} of $1,762 > t_{\text{table}} 2,000$ with significance $0,083 < 0,05$. Variable general allocation funds effect positive and significantly to capital expenditures with a value $t_{\text{count}} 3,231 > t_{\text{table}} 2,000$ with significance $0,002 < 0,05$. Variable funds for tax results negative and insignificant towards capital expenditure with a value $t_{\text{count}} 0,320 > t_{\text{table}} 2,000$ with significant $0,750 < 0,05$. Variable funds for Results is not a tax show positive and significane to capital expenditures with a value of $t_{\text{count}} 2,606 > t_{\text{table}} 2,000$ with significance $0,012 < 0,05$. F test showed that simultaneously (together) fourth independent variable are local own revenue, general allocation funds, funds for tax results, and funds for Results is not a tax significantly influence capital expenditures to test the value of $F_{\text{count}} 47,539 > F_{\text{table}} (4; 60) = 2,53$ with significance $0,000 < 0,05$.

Based on the analysis of the Adjusted R Square shows that the influence of local own revenue, general allocation funds, funds for tax results, funds for results is not a tax to capital expenditures, which is 74,4% and the remaining 25,6% is influence by other variables that are not included in this study as it can be explained by other free variables such as specific allocation fund and the income transfers from central government.

Based on the above research provides advice to local government to further increase the potential sources of the region in order to improve the reception area and used in the construction and regional purpose.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, berkah dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur”**. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju alam pencerahan. Serta ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta yang sudah memberikan semangat dan doanya selama penulis menyusun skripsi hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H.Suyatno, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.i., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Daram Heriansyah., SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

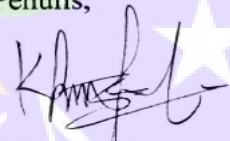
7. Bapak Ahmad Subaki, S.E., M.M., Ak., CA., CPA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran-saran serta pembelajaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran-saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Nur Aulya Winda Fadilah, Putri Amanda Herdini, Mujiati, dan Siti Fadilah Insani yang selalu mendukung dan menemani dalam mengerjakan skripsi ini hingga terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat Opi, Eka, There, Resti, Amel, Rizka, dan Irma yang selalu menyemangati dan selalu bertanya kapan sidang.
11. Teman-teman Akuntansi B angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam tata bahasa maupun ruang lingkup permasalahan, oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 07 Agustus 2017
Penulis,



(Khoirun Nisa)
NIM. 1202025095

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah	6
1.2.3 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Telaah Pustaka	24
2.2.1 Keuangan Negara	24
2.2.2 Keuangan Daerah	25

2.2.3	<i>Akuntansi</i>	26
2.2.4	<i>Akuntansi Sektor Publik</i>	27
2.2.4.1	<i>Definisi Akuntansi Sektor Publik</i>	27
2.2.4.2	<i>Akuntansi Keuangan Daerah</i>	28
2.2.4.3	<i>Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik</i>	29
2.2.5	<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	30
2.2.5.1	<i>Definisi Pendapatan Asli Daerah</i>	30
2.2.5.2	<i>Sumber Pendapatan Asli Daerah</i>	31
2.2.6	<i>Dana Alokasi Umum</i>	35
2.2.7	<i>Dana Bagi Hasil Pajak</i>	36
2.2.7.1	<i>Definisi Dana Bagi Hasil Pajak</i>	36
2.2.7.2	<i>Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak</i>	37
2.2.8	<i>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</i>	40
2.2.8.1	<i>Definisi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</i>	40
2.2.8.2	<i>Pembagian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak</i>	41
2.2.9	<i>Belanja Modal</i>	45
2.2.9.1	<i>Definisi Belanja Modal</i>	45
2.2.9.2	<i>Kategori Belanja Modal</i>	46
2.3	<i>Standar Akuntansi Pemerintahan</i>	47
2.4	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i>	49
2.5	<i>Rumusan Hipotesis</i>	52
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	<i>Metode Penelitian</i>	53
3.2	<i>Operasionalisasi Variabel</i>	53
3.3	<i>Populasi dan Sampel</i>	58
3.4	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	61
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i>	61
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i>	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1	<i>Gambaran Umum Objek Penelitian</i>	69

4.1.1	<i>Lokasi Penelitian</i>	69
4.1.2	<i>Sejarah Singkat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)</i>	70
4.1.3	<i>Gambaran Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur</i> .	70
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Analisis Data	75
4.2.1	<i>Penyajian Data</i>	75
4.2.2	<i>Analisis Akuntansi</i>	137
4.2.2.1	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal</i>	137
4.2.2.2	<i>Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal</i>	143
4.2.2.3	<i>Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal</i>	148
4.2.2.4	<i>Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Modal</i>	153
4.2.2.5	<i>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Belanja Modal</i>	158
4.2.3	<i>Analisis Akuntansi</i>	164
4.2.3.1	<i>Analisis Statistik Deskriptif</i>	164
4.2.3.2	<i>Analisis Regresi Linier Berganda</i>	165
4.2.3.3	<i>Uji Asumsi Klasik</i>	167
4.2.3.4	<i>Uji Hipotesis</i>	174
4.2.3.5	<i>Analisis Koefisien Determinasi (Uji R²)</i>	178
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian.....	179
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	185
5.2	Saran-saran	188
DAFTAR PUSTAKA		191
LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	17
2.	Operasional Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dan Belanja Modal	55
3.	Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.....	58
4.	Pemilihan Sampel Penelitian.....	60
5.	Sampel Penelitian.....	61
6.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2015	76
7.	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2011-2015	81
8.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Tahun 2011-2015	86
9.	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) Tahun 2011-2015	91
10.	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal (BM) Tahun 2011-2015 ...	96
11.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2011-2015	101
12.	Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2011-2015	110
13.	Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Tahun 2011-2015.....	117
14.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) Tahun 2011-2015.....	124
15.	Belanja Modal (BM) Tahun 2011-2015.....	131
16.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal (BM).....	138
17.	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM).....	143
18.	Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) terhadap Belanja Modal (BM).....	148
19.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) terhadap Belanja Modal (BM).....	153
20.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum	

(DAU), Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) terhadap Belanja Modal (BM).....	158
21. Hasil Analisis Deskriptif <i>Descriptive Stastics</i>	164
22. Uji Koefisien <i>Coefficients</i>	166
23. Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smonov Test</i>	169
24. Uji Multikolinearitas <i>Coefficients</i>	170
25. Uji Autokorelasi <i>Model Summary</i>	172
26. Hasil Uji <i>Runs Test</i>	173
27. Hasil Uji <i>Statistik t</i>	175
28. Uji Anova	177
29. Hasil Uji Koefisien Determinasi	178
30. Interpretasi Hasil Pengujian Hipotesis	179

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	51
2.	Grafik Normal <i>P</i> -plot <i>Regression Standardized Residual</i>	168
3.	Grafik <i>Scatterplot</i>	171
4.	Daerah Pengujian <i>Durbin Watson</i>	173

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2015	1/37
2.	Tabel Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2015	5/37
3.	Tabel Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2015	9/37
4.	Tabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (DBHBP) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2015	13/37
5.	Tabel Belanja Modal (BM) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2011-2015	17/37
6.	Hasil <i>Output</i> SPSS Versi 20.0	21/37
7.	Tabel t	26/37
8.	Tabel F	27/37
9.	Tabel <i>Durbin Watson</i>	28/37
10.	Surat Pengambilan Data pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia	29/37
11.	Formulir Pengajuan Judul Proposal Skripsi	31/37
12.	Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi	32/37
13.	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi	33/37
14.	Surat Tugas	34/37
15.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I	35/37
16.	Catatan Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II	36/37
17.	Contoh Laporan Realisasi Anggaran Jawa Timur	37/37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah berakhirnya krisis ekonomi pada tahun 1998 mengakibatkan pemerintah pusat memutuskan untuk mengalihkan sebagian dari wewenangnya kepada pemerintah daerah. Wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah berupa kemandirian dalam mengelola keuangannya sendiri. Hal ini dilakukan pemerintah pusat selain untuk mengurangi beban tanggung jawab di pusat dan tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat secara resmi memberikan status otonomi daerah kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan usahanya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007 : 30).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan mengawasi kinerja pemerintah melalui anggaran. Bentuk pengawasan ini dilakukan agar dapat terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pemerintahan, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 proses penyusunan anggaran melibatkan 2 (dua) pihak : pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan pihak

legislatif (DPRD), masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Eksekutif berperan sebagai pelaksana operasional daerah yang berkewajiban membuat rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan legislatif bertugas mensahkan rancangan APBD dalam proses ratifikasi anggaran. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam APBD merupakan kegiatan pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

Menurut Mohamad Mahsun dkk., (2013 : 99), belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasional dan pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum belanja modal memiliki peranan penting karena memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Belanja modal dimaksudkan mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Sementara itu, pemerintah memiliki anggaran relatif terbatas dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah telah meningkatkan anggaran belanja modal dan pembangunan infrastruktur, tetapi anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur masih dinilai belum mencukupi. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat mengalokasikan APBD-nya untuk belanja modal, dan tidak habis digunakan untuk belanja pegawai dan belanja rutin.

Pemerintah berhasil merealisasikan belanja modal APBN 2015 mencapai Rp. 213 triliun, meningkat 54% dari serapan belanja modal dalam APBN 2014 sebesar Rp. 138 triliun. Berdasarkan catatan antara, realisasi belanja modal sebesar Rp. 213 triliun merupakan yang tertinggi. Jika pada 2010, realisasi belanja modal masih mencapai Rp. 80,3 triliun, setahun kemudian realisasinya menjadi Rp. 117,9 triliun, pada 2012 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. 145,1 triliun dan Rp. 171,8 triliun, kemudian turun menjadi Rp. 198,3 triliun pada 2014. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahazil mengatakan “Belanja modal inilah yang dipakai untuk membangun infrastruktur sebagai landasan pembangunan ekonomi kita ke depan, pada 2015 ini pula, pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 20,8 triliun untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di seluruh desa di Indonesia yang seluruh dananya telah tersalurkan”, ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahazil, Jakarta, Senin. (*AntaraNews*, 4 Januari 2016).

Di dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk belanja daerah bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Nunuy Nur Afiah (2008 : 15), Pendapatan asli daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Muhammad Edwin Kadafi (2013) menyatakan pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan Nugroho Suratno Putro (2013) yang menyatakan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal disebabkan karena pendapatan asli daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja langsung.

Menurut Sonny Sumarsono (2010 : 90), dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Peranan dana alokasi umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Nugroho Sularno Putro (2010) menyatakan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, berbeda dengan Fitria Megawati Sularno (2013) menyatakan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Dana bagi hasil pajak dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21. Alfian Harahap (2009) menyatakan dana bagi hasil pajak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Berbeda dengan Asrul Wisnu Setiawan (2015) yang menyatakan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Menurut Deddi Nordiawan dkk., (2009 : 51), dana bagi hasil bukan pajak adalah dana bagi hasil sumber daya alam yang berasal dari 6 (enam) sektor, yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Ester Junita (2016) menyatakan dana bagi hasil bukan pajak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Berbeda dengan Ummu Khoiriah (2014) yang menyatakan dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
3. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
4. Apakah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?
5. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan secara simultan berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana bagi hasil pajak, dan dana bagi hasil bukan pajak terhadap pengalokasian anggaran belanja odal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun yakni periode tahun 2011–2015.

1.2.3 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang penulis akan kemukakan pada penelitian ini adalah “Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dapat mempengaruhi Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pajak, dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Pengalokasian Anggaran belanja modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan suatu yang sangat berharga untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh penulis selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan juga dapat memberikan manfaat berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Pemerintah Daerah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penting yang mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

2. Bagi Mahasiswa.

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam teori akuntansi sektor publik dengan praktek sesungguhnya.

3. Bagi Akademik.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu yang bisa dijadikan bahan pembelajaran, serta sebagai bahan referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Akuntansi Sektor Publik., Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi 4). Jakarta : Salemba Empat.
- Arbie Gugus Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012*. Jurnal Analisis Akuntansi ISSN 2252-6765 Vol. 2 No. 1 Hal. 44-51 Juli 2013. Semarang : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Asrul Wisnu Setiawan. (2015). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kabupaten/Kota di Yogyakarta Periode Tahun 2007-2013*. Skripsi. Surakarta : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bahtiar Arif. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Akademia : Jakarta.
- Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta : INDEKS.
- Deddi Nordiawan, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati. (2009). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Erlina, Omar Sakti Rambe dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ester Junita. (2016). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Selatan Periode 2009-2012*. Skripsi. Medan : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara.
- Fitria Megawati Sularno. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2007-2011)*. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama.

- Hanif Nurcholis. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Harahap, Alfian. (2009). *Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatra Utara tahun 2005-2007)*. Skripsi. Medan : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara.
- Imam Ghozali. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indra Bastian. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mohamad Mahsun, Firman Sulistiyowati, dan Andre Purwanugraha. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3)*. Yogyakarta : BPFE.
- Muhammad Edwin Kadafi. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Bandung)*. Skripsi. Bandung : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widyatama.
- Muindro Renyowijoyo. (2013). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Ketiga)*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Nugroho Suratno Putro. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2008)*. Skripsi. Semarang : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Nunuy Nur Afiah. (2008). *Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Bandung : Kencana.
- Nurlis. (2016). *The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case : The Local Government of Indonesia. In International Journal of Finance and Accounting of ISSN 2222-1697 Vol.7 No. 1 Page 107-113 July 2016. Indonesia : Department of Accounting Business and Economics Mercubuana University.*
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. (2006). *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

_____. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

_____. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

_____. (2005). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah.

_____. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah.

_____. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rudianto. (2009). *Penganggaran : Konsep dan Teknik Penyusunan*. Jakarta : Erlangga.

Soemarso S. Rahardjo. (2009). *Suatu Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sonny Sumarsono. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Tanjung, Abdul Hafiz. (2008). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamdiyah Prof. DR. HAMKA.

Ummu Khoiriah. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatra Utara*. Skripsi. Medan : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatra Utara.

Warren, Carl S., James M. Reeve, dan Jonathan E. Duchac. (2014). *Pengantar Akuntansi*. Tim Penerjemah. (Edisi 25). Jakarta: Salemba Empat.

Weygandt, Jerry J., Donald E. Kieso, dan Paul D. Kimmel. (2011). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.

Yudi Satrya Aprizay, Darwanis, dan Muhammad Arfan. (2014). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh tahun 2010-2011* . *Jurnal Akuntansi* ISSN: 2302-0164 Vol.3No. 1Hal. 140-149 Februari 2014. Banda Aceh. Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Lumpur dan Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Lumpur.

www.antaranews.com

www.djpk.depkeu.go.id